

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebijakan pemekaran nagari di Sumatera Barat tidak hanya bisa dilihat dari aspek pemerintahan dan regulasi negara saja. Nagari di Sumatera Barat memiliki dualisme bentuk nagari, yaitu: Nagari adat dan nagari administratif. Dalam penelitian ini, pemekaran nagari di Anduring terdapat perbedaan representasi ruang antara nagari menurut adat dan nagari menurut negara. Perbedaan representasi ruang ini menjadi penyebab konflik pemekaran nagari sehingga membuat pemekaran nagari ini mengalami hambatan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, temuan utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pemekaran ini mengalami hambatan karena mendapatkan pertentangan oleh ninik-mamak (bagian dari nagari adat) yang terorganisir dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Anduring. Nagari adat ingin mempertahankan nagarinya agar tidak mekar dengan alasan menjaga struktur adat (wilayah adat dan tanah ulayat) di nagari Anduring serta menjaga agar sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah Asam Pulau tidak diambil oleh pihak luar setelah pemekaran.
- b. Faktor yang mendorong nagari administratif untuk melakukan pemekaran adalah faktor geografis yang membuat pelayanan publik menjadi sulit dan faktor pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemekaran, maka wilayah Asam Pulau memiliki Kantor Wali Nagari dan bisa memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan pembangunan serta pelayanan publik dengan

memaksimalkan potensi sumber daya alam dan ekonomi yang ada di wilayah Asam Pulau

- c. Nagari adat dan nagari administratif memiliki representasi ruang yang berbeda. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan serta strategi masing-masing untuk memperebutkan ruang nagari.

Berdasarkan termuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemekaran nagari ini terhambat karena antara nagari adat dan nagari administratif memiliki representasi ruang yang berbeda terkait ruang nagari. Ini yang menjadi penyebab konflik. Nagari menurut adat berlandaskan kepada nilai adat dan memiliki batas wilayah adat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan sedangkan nagari menurut negara berlandaskan kepada undang-undang dan regulasi negara.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka ada beberapa rekomendasi saran yang dapat diterapkan, yaitu:

- a. Pemekaran nagari membutuhkan pendekatan yang holistik. Pendekatan yang dilakukan negara cenderung top-down dan hanya mementingkan kebutuhan administrasi dan pengelolaan sumber daya tanpa memperhatikan struktur adat. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan yang partisipatif dengan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait.
- b. Pentingnya sinergi antara nagari adat dan nagari administratif. Dibutuhkan kolaborasi antara nagari adat dan nagari administratif dalam proses pemekaran dengan cara negara memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan melibatkannya dalam proses pemekaran nagari

- c. Untuk penelitian selanjutnya dapat disarankan agar melakukan penelitian tentang pemekaran nagari di wilayah Asam Pulau setelah pemekaran ini berhasil dilakukan atau Korong Asam Pulau telah mendapatkan status sebagai nagari persiapan.

